

Vol. 5 No. 2 Juli - Desember 2018

ISSN: 2356 - 4180 (Print)

2442 - 8663 (Online)

J U R N A L

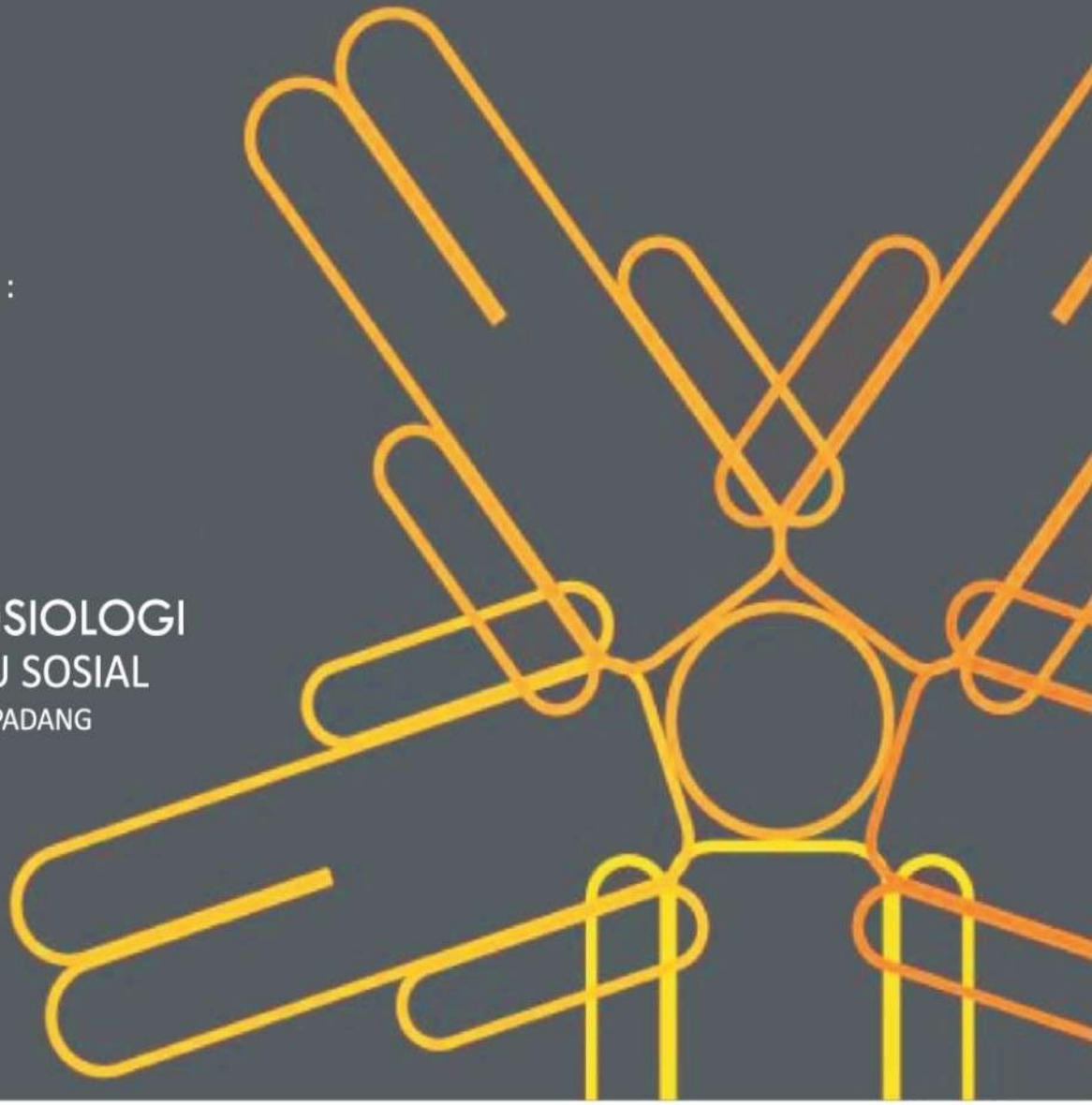
S O C I U S

Journal of Sociology Research and Education

DITERBITKAN OLEH :



LABOR
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



SOCIUS

Vol. 5, No.2, Th. 2018
ISSN : 2356-4180 (cetak)
2442-8663 (online)

REDAKSI JURNAL SOCIUS

Ketua Dewan Penyunting :
Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D.

Wakil Ketua Dewan Penyunting :
Erda Fitriani, S.Sos., M.Si.

Dewan Penasehat:

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dr. Mestika Zed, MA.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph. D.
(Universitas Negeri Padang)
Bakhrul Khair Amal, SE.,M.Si.
(Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.
(Universitas Negeri Manado)
Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.
(Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Jendrius, M.Si.
(Universitas Andalas)
Adri Febrianto, S.Sos., M.Si.
(Universitas Negeri Padang)
Drs. Ikhwan, M.Si.
(Universitas Negeri Padang)

Dewan Penyunting:

Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si.
Dr. Desy Mardiah, S.Sos., S.Thi., M.Si.
Ike Sylvia, S.IP., M.Si.
Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si.
M. Isa Gautama, S.Pd., M.Si.
Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd.

Layout Editor :
Rhavy Ferdyan, S.Pd.

Technical Support:
Rudi Mahesa, A.Md.

Alamat Redaksi:
Jurusan Sosiologi FIS UNP
Jl. Prof.Dr.Hamka
Kampus UNP Air Tawar
e-mail: sosan@fis.unp.ac.id

Penerbit
Labor Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Padang

DAFTAR ISI

Artikel :

Dendy Marta Putra

Tradisi Aia Kubah Pada Masyarakat Lubuak Landua Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Halaman 53-60

Mahbib Khoiron

“Negara Vis-a-vis Jemaat Ahmadiyah: Dominasi yang tak Konstan”
Halaman 61-74

Mayang Puti Seruni dan Rusliwa Soemantri

Relasi Kekuasaan Dalam Sektor Ekonomi Informal: Suatu Dialektika
Kontrol
Halaman 75-89

Dian Maulana

Perilaku dan Sikap Warga terhadap Pengelolaan Sampah di Bantaran
Ciliwung
Halaman 90-101

Hendra Naldi

Perkembangan Kognitif, Bahasa dan Sosioemosional serta Implikasinya
dalam Pembelajaran
Halaman 102-114

**RELASI KEKUASAAN DALAM SEKTOR INFORMAL:
STUDI KASUS LAPAK PEMULUNG DI KADEMANGAN
KOTA TANGERANG SELATAN**

Mayang Puti Seruni dan Rusliwa Somantri

Universitas Indonesia

Email: mayangputi.s@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem lapak pemulung di perkotaan. Kajian ini menggunakan perspektif dialektika dinamis antara agensi dan struktur dalam kaitannya dengan proses yang berlangsung. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mengumpulkan data dengan melakukan triangulasi. Temuan kami menunjukkan bahwa deprivasi dan eksklusi sosial yang dialami oleh aktor marjinal di dalam sektor informal baik disebabkan oleh limitasi struktural maupun oleh agensi mereka sendiri.

Kata kunci: *Sektor Informal Perkotaan, Relasi Kekuasaan, Struktur Dominasi, Deprivasi Sosial, Eksklusi Sosial, Limitasi Struktural.*

Abstract

This research attempts to explain the relation between actors involved in waste-pickers shanties system in the urban area. This study took the perspective of dynamic dialectics between agency and structure in correlation with the ongoing process. We used qualitative research method in order to collect data, by performing triangulation. Our findings show that social deprivation and social exclusion experienced by marginal actors in informal sector caused not only by structural limitation but also by their own agency.

Keywords: *Urban Informal Sector, Power Relation, Structure of Domination, Social Deprivation, Social Exclusion, Structural Limitation*



Received: November 29, 2018

Revised: December 3, 2018

Available Online: December 21, 2018

Pendahuluan

Ekonomi informal umumnya dipandang sebagai antithesis dari kemajuan dan modernitas. Namun sejumlah besar industri di negara dunia ketiga saat ini memilih untuk meletakkan pondasinya pada sektor informal (Utama, 2013), terutama pada wilayah hulu. Industri daur ulang adalah salah satu yang melakukan strategi ini. Mereka menyandarkan suplai bahan mentahnya pada pemulung. Fluktuasi harga plastik daur ulang di tingkat global,

misalnya, dipengaruhi salah satunya oleh pergerakan pemulung pada basis mereka di negara-negara dunia ketiga¹.

Secara umum sektor informal berperan besar dalam perkembangan kapitalisme; malah sebagian menjadi penopang utama bagi ekonomi negara. Data menunjukkan bahwa lebih dari setengah pekerja non-agrikultural di negara berkembang merupakan pekerja informal (ILO/WIEGO, 2013). Di Asia Tenggara secara khusus, angkanya adalah sebesar 65%. Kontribusi ekonomi informal di dalam ekonomi nasional (non-agrikultural) pun cukup besar; di Afrika Barat angkanya lebih dari 50%, dan di India sebesar 46% (ILO/WIEGO, 2013). Di Indonesia sendiri, ekonomi informal merupakan sektor yang sangat besar. Menurut data BPS (2017), angkanya berada pada 58,35% pada Februari 2017. Sementara itu, perbedaan tajam terlihat pada negara maju, yang angka kegiatan informalnya umumnya tidak lebih dari 20% dari keseluruhan ekonomi nasional (ILO/WIEGO, 2013).

Modernisasi –secara tradisional dilihat-, mensyarakatkan rasionalisasi; yang konsekuensinya adalah birokrasi formal. Akan tetapi eksistensi ekonomi informal tetap tinggibahkan beberapa dekade setelah dimulainya birokratisasi. Fenomena ini dijelaskan umumnya melalui empat aspek berikut: 1). Melihatnya sebagai kegagalan suatu negara dalam proses modernisasi (sudut pandang klasik), dan mewujudkan kesejahteraan rakyat; 2). Dipandang sebagai salah satu strategi kapitalis untuk menekan biaya produksi; 3). Sebagai bentuk kreatifitas dan kemampuan agen ekonomi melihat peluang kerja; 4). Gabungan dari aspek tersebut. Masing-masing sudut pandang tersebut memiliki konsekuensi akademis. Sudut pandang yang pertama dan kedua pada umumnya mengkaji kasus pekerja sektor informal dalam kerangka pikir eksklusif dan ketimpangan sosial. Sementara yang ketiga biasanya muncul dari studi-studi entrepreneurial dan pluralis yang berfokus pada agensi. Sudut pandang yang ke empat berangkat dari hipotesa bahwa meskipun pada satu sisi bertumbuhnya ekonomi informal merupakan gejala dari ketertutupan (eksklusif) dan stagnansi birokrasi dan institusi formal, namun sisi lain kegiatan ekonomi informal juga dapat dilihat sebagai solusi dari birokrasi yang terlalu kaku.

Kasus pemulung memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai dinamika ekonomi informal; dan pada sendirinya merupakan profesi sektor informal yang unik. Merujuk pada penelitian ekonomi informal Khasnabis dan Nag (2001) di India, ditemukan intimidasi dan eksploitasi yang besar terjadi pada buruh tenun wilayah Nadia, baik oleh majikan maupun pasar. Pola relasi demikian juga ditemukan pada kasus pemulung di negara tersebut (Dias & Samson, 2016). Selain itu pemulung di India hampir selalu dilakoni oleh kasta terendah (yaitu Dalit), yang mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan formal yang rendah (Sriranjini, 2010)² dan status sosial ekonomi yang terendah pula (Vivek, 2000). Bukan hanya India, hal serupa juga terjadi di daerah-daerah lainnya di negara dunia ketiga (Tevera, 1994). Namun dinamika yang agak berbeda terjadi di Indonesia. Memang, Di Indonesia keberadaan pemulung hampir seperti siluman di hadapan regulasi dengan belum ditemukannya publikasi data statistik mengenai mereka, yang disertai apresiasi yang rendah terhadap kontribusinya. Tidak disangkal pula bahwa profesi tersebut hampir seluruhnya dilakoni oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang rendah, dan relasi kerjanya diwarnai oleh eksploitasi pasar. Akan tetapi berbeda dengan kasus di India, pemulung Indonesia memiliki fleksibilitas kerja yang lebih besar; salah satunya ditandai dengan tingginya pergerakan dan turn over pemulung. Hal ini mengindikasikan kebebasan yang lebih besar dimiliki oleh pemulung di Indonesia.

¹ Importir plastik daur ulang terbesar adalah RRC, dimana eksportir utama dari pellet plastik daur ulang kepada negara tersebut adalah negara-negara Asia Tenggara.

² Di Bangalore, 46% pemulung berasal dari kasta terbuang, dan 21% berasal dari kasta rendah lainnya (Sriranjini, 2010: 5).

Karakteristik yang berbeda-beda ini menimbulkan perspektif yang berbeda pula dalam studi mengenai pemulung, seperti halnya dalam studi mengenai ekonomi informal secara keseluruhan. Studi terkini mengenai pemulung dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan pendekatannya dalam melihat relasi kuasa, antara lain: struktural, individualis, dan relasional. Pendekatan struktural digunakan oleh studi yang ingin mengkaji kaitan langsung antara tingkat intervensi pemerintah dengan derajat eksklusi yang terjadi pada pemulung; terutama pada rendahnya serapan sektor formal. Studi yang demikian berargumen bahwa solusi inklusi terhadap pemulung adalah melalui formalisasi profesi pemulung. Pendekatan individualis tidak menyangkal bahwa hadirnya pemulung disebabkan oleh eksklusi sektor formal, tetapi menurut studi tersebut pemulung hadir bukan selalu karena tidak ada pilihan lain. Seringkali pemulung lebih memilih profesi tersebut ketimbang pekerjaan di sektor formal; sebagai bentuk agensi. Dengan demikian, formalisasi bukanlah solusi paling mutakhir. Studi dengan pendekatan relasional, di lain pihak, fokus kepada relasi di dalam organisasi informal bisnis daur ulang. Beberapa dari studi tersebut mengilustrasikan proses negosiasi kekuasaan dan eksklusi yang cukup kompleks di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok.

Dengan pemahaman bahwa distribusi kekuasaan terletak pada relasi dan interaksi (Giddens, 1993), pendekatan relasional dirasa lebih cocok digunakan untuk menganalisa kasus operasi pemulung. Namun kebanyakan studi berpendekatan relasional kurang menggali bagaimana proses reproduksi sistem sosial menjadi bagian paling penting dari proses agensi sekaligus dominasi dan eksklusi. Relasi kekuasaan seharusnya menjadi konsep utama dalam kajian seputar eksklusi sosial dan agensi pemulung. Kekuasaan memiliki dua sisi (transformatif dan dominasi) (Giddens, 1979), yang bekerja baik pada tataran struktural maupun di dalam zona refleksi individu. Eksklusi kemudian bukan hanya berasal dari 'luar' individu, tetapi juga dari dalam diri individu, yang mengeksklusi dirinya sendiri (Wirutomo, 2016).

Pemikiran Giddens menarik untuk digunakan dalam melihat bagaimana relasi kuasa dan reproduksinya berjalan di dalam sektor ekonomi informal (pada umumnya) dan di dalam lapak pemulung (pada khususnya). Sektor informal adalah sebetulnya 'anomali' dalam kerangka struktural; yang secara terburu-buru disebut Parson sebagai gejala penyimpangan. Namun dalam kerangka pemikiran Giddens, anomali adalah produk dari dialektika kontrol, yaitu bahwa agen disebut sebagai agen karena melakukan peran aktifnya dalam relasi kekuasaan meskipun dalam hubungan yang tidak seimbang antara superordinat dengan subordinat. Dengan demikian, anomali adalah bukti kepemilikan atas kekuasaan serta hasil dari pengamalan kekuasaan tersebut oleh agen subordinat (kekuasaan sebagai kemampuan transformatif). Keempat paradoks dalam sektor informal yang diutarakan oleh Portes dan Haller (2005), merupakan bentuk dari dialektika kontrol dalam relasi kekuasaan. Kesimpulan yang diajukan oleh mereka salah satunya adalah semakin kuat kontrol negara untuk mengurangi informalitas, semakin kuat pula resistensi dari aktor ekonomi dengan melakukan lebih banyak informalitas. Giddens mengatakan bahwa selalu ada celah dalam semua bentuk peraturan, yang memungkinkan aktor subordinat untuk mengambil keuntungan daripadanya dalam kerangka relasinya dengan superordinat (Giddens, 1985). Yang menarik lagi, Portes dan Haller mengatakan bahwa kegiatan penentangan yang dilakukan agen (berupa aktivitas secara informal), memiliki fungsi untuk menyeimbangkan tatanan ekonomi yang ada (paradoks dari *embeddedness*, dan paradoks dari fungsi). Studi ini ingin mengangkat dinamika relasi sosial pemulung sebagai salah satu pelaku ekonomi informal melalui sudut pandang dualitas struktur kekuasaan yang dikemukakan oleh Giddens.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agensi pemulung dan relasi mereka dengan lingkungannya, serta implikasi dari relasi tersebut; untuk dapat melihat bagaimana bentuk dan pola relasi kuasa dalam kerangka ekonomi informal di Indonesia. Menggunakan pemahaman Giddens, peneliti memahami relasi kekuasaan sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan interaksi, interpretasi dan refleksi subyek di dalam dunia sosial yang direproduksi secara terus-menerus. Oleh sebab itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian studi kasus, dengan menggunakan teknik pengumpulan data utamanya berupa wawancara dan diskusi terarah, yang dikombinasikan dengan observasi lapangan dan penelitian data sekunder. Wawancara dan observasi dilakukan baik secara semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. Pemilihan informan dilakukan dengan dua teknik, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*; ditentukan sesuai dengan karakter informan.

Penelitian dilakukan pada dua waktu yang berbeda; pertama pada rentang waktu 2014-2016, kedua pada tahun 2018. Meskipun demikian familiaritas dengan lokasi dan subyek penelitian telah terjalin sejak tahun 2012. Lokasi penelitian selalu sama, yaitu pada wilayah TPA Cipeucang. Alasan pemilihan lokasi didasari pada beberapa hal: 1). Kota Tangerang Selatan dipilih karena merupakan wilayah perkotaan yang menjadi salah satu tujuan utama migrasi urban; 2). Lapak pemulung yang disasar adalah yang berada di wilayah TPA Cipeucang karena kawasan tersebut membentuk komunitas tersendiri yang cukup terpisah dengan lingkungan sekitarnya; 3). Diputuskan untuk memilih salah satu lapak yang tertua, karena kebertahanannya dan keterbukaan bandar lapaknya pada proses penelitian ini. Lapak yang diteliti hanya satu unit, karena tidak bersedianya bandar lapak lain untuk terlibat di dalam penelitian. Masalah ini muncul karena terlalu seringnya kawasan tersebut dijadikan obyek penelitian dan pemberdayaan (beberapa meninggalkan kesan negatif), sehingga komunitas lapak agak sensitif terhadap orang asing. Namun demikian, peneliti tetap melakukan studi kecil pada lapak-lapak lainnya, sebagai suatu tindakan triangulasi data.

Teori Relasi Kekuasaan

Pemikiran Giddens mengenai relasi kekuasaan agak berbeda dengan kebanyakan teori sosial yang sudah ada. Menurut Giddens, kekuasaan memiliki dua wajah (seperti halnya dualitas struktur). Pada satu aspek, untuk menjadi agen manusia adalah untuk memiliki kuasa atau mampu untuk menerapkan/mengupayakan sebarang kekuasaan, dalam kondisi dimana hasil dari tindakan tersebut juga turut ditentukan oleh pihak lain, yang disebut sebagai kemampuan transformatif (*transformative capacity*) (Giddens, 1984: 14). Agensi itu sendiri didefinisikan sebagai sebarang kekuasaan, yaitu suatu tindakan intervensi individu dalam kompleksitas kejadian (*events*) di dunia dengan maksud untuk semacam mengubahnya (Giddens, 1985: 7).

Tidak semua agen dapat mencapai hasil tindakan yang ia niatkan. Keberhasilannya tergantung pada keakuratan pengetahuan yang ia miliki, dan kesesuaian pengetahuan tersebut dengan konteks dimana tindakan dan keagenan tersebut dieksekusi (1993: 90). Selain itu, agensinya juga berhadapan dengan pihak lain. Yang membawa kita pada aspek kedua dari kekuasaan: yaitu kekuasaan sebagai struktur dominasi (Giddens, 1979: 91). Hal ini berarti, kekuasaan bukan hanya berarti kemampuan keagenan aktor untuk mencapai keinginan atau niatnya, tetapi juga berarti sebagai suatu kerangkeng limitasi terstruktur yang dilanggengkan yang menekan aktor sosial. Salah satu penyebab lahir dan lestarnya struktur dominasi adalah

karena adanya perbedaan sumber daya yang di bawa ke dalam interaksi oleh masing-masing agen.

Struktur –atau lebih tepatnya properti struktural-, terdiri dari aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*). Memiliki kekuasaan yang dualistis berarti adalah kemampuan memanfaatkan sumber daya, dimana sumber daya juga bersifat dualistis. Yaitu tidak hanya merupakan media melalui mana kekuasaan dipraktekkan (kemampuan transformatif), tetapi juga media melalui mana struktur dominasi direproduksi. Sumber daya terdiri dari dua tipe: sumber daya alokatif (*allocative*) dan sumber daya otoratif (*authorative*) (1979: 93). Sumber daya alokatif adalah alat kekuasaan terkait dengan fasilitas material, sementara sumber daya otoratif adalah alat penguasaan atas aktivitas manusia (Giddens, 1985: 7). Masing-masing sumber daya seringkali bekerja secara bersamaan. Elemen lainnya dari struktur adalah aturan (*rules*)³; yang terdiri dari kode dan norma. Properti baru dapat menjadi suatu sumber daya dalam interaksi (termasuk dalam relasi kekuasaan) setelah melalui signifikasi dan legitimasi (kode dan norma). Dengan adanya norma, berarti ada sanksi yang terlibat dalam setiap interaksi. Salah satu moda operasi dari kekuasaan adalah dengan memobilisasi bias, termasuk di dalamnya dalam hal pembuatan kerangka makna.

Disinilah letak pentingnya kekuasaan (baik dalam wajahnya yang manapun⁴) dalam kerangka ilmu sosial; peran besarnya dalam produksi makna di dalam interaksi. Kerangka makna adalah penting, sebab merupakan media dari aktivitas praktis manusia (1993: 120), dan merupakan bagian dari produksi dan reproduksi struktur dan tatanan sosial; yang kemudian berperan pula dalam produksi kekuasaan itu sendiri. Kegiatan reflektif manusia dalam menentukan kerangka makna dikarakterkan oleh kepemilikan kekuasaan yang tidak imbang dalam interaksi sosialnya (Giddens, 1993: 120). Fungsi kekuasaan dalam memproduksi dan mereproduksi interaksi tersebut, membuatnya menjadi suatu modalitas strukturasi⁵ (Giddens, 1979: 81). Dengan kata lain, merupakan suatu cara bagaimana mensukseskan kondisi yang mengatur keberlanjutan atau transformasi struktur dan dengan demikian, reproduksi sistem (1979: 66).

Strategi kontrol merupakan suatu upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan kepatuhan dari pihak lain dalam relasi kekuasaan. Relasi kuasa adalah relasi antara otonomi (*authonomy*) dan dependensi (*dependende*) antar aktor individu maupun antar aktor kolektif (Giddens, 1979: 93; Giddens 1985: 8), dimana pihak subordinat selalu memiliki sebetuk otonomi, dan pihak superior juga selalu memiliki dependensi. Dengan demikian interaksi selalu terjadi dalam dinamika dialektika kontrol. Struktur dan relasi kekuasaan tersebut selalu diproduksi dan direproduksi oleh aktor dalam konteks ruang dan waktu (Giddens, 1979: 103). Keberhasilan aktor dalam memetakan ruang dan waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan dan tindakan yang sesuai (termasuk dengan tidak bertindak sama sekali), merepresentasikan kepemilikannya atas kekuasaan (kekuasaan sebagai kemampuan transformatif). Interaksi pada konteks ruang dan waktu yang berbeda, dapat menghasilkan dinamika relasi kekuasaan yang berbeda pula; yang implikasinya, berupa

³Rules juga dualistis. Di satu sisi bersifat transformative, di sisi lain juga menjadi media melalui mana sistem sosial direproduksi.

⁴Dua wajah dan atau dualitas kekuasaan.

⁵ Stukturasi adalah kondisi yang mengatur keberlanjutan atau transmudasi dari struktur; dengan demikian, reproduksi dari sistem sosial (Giddens, 1984: 25). Untuk mempelajari strukturasi dari sistem sosial adalah untuk mempelajari bagaimana sistem tersebut, melalui pengaplikasian aturan dan sumber daya, dan dalam konteks 'unintended outcomes' (hasil yang tak diinginkan), diproduksi dan direproduksi di dalam interaksi. (Giddens, 1979: 66)

produk kondisi dan tatanan sosial yang bisa jadi berbeda. Sementara itu, reproduksi kekuasaan dapat terjadi dan bertahan tergantung pada ‘*predictability*’ (ketertebakan) dari kejadian sehari-hari, yang secara pada umumnya secara ‘tidak sadar’ diupayakan oleh aktor sosial; dengan kata lain, aktor memastikan bahwa terjadi semacam regularisasi kejadian dan upaya pelestarian terhadapnya (Giddens, 1985: 11). Aspek inilah yang berkontribusi dalam proses pelestarian struktur dan sistem sosial, yang dengan demikian berarti juga pelestarian kekuasaan.

Struktur Hubungan Informalitas Dalam Perspektif Relasi Kekuasaan

Kekuasaan –disadari ataupun tidak- adalah salah satu topik paling hangat yang dibahas di dalam semesta studi mengenai pemulung. Sebagian dari studi tersebut hampir mengabaikan agensi pemulung sama sekali, sementara sebagian lainnya justru agak menyepikan limitasi-limitasi yang menghadang tindakan pemulung. Namun bagaimanapun, relasi para aktor dalam sektor ekonomi informal, sangat kompleks, sehingga tidak dapat disederhanakan ke dalam dua kutub pemahaman ini. Sebagai agen di dalam praktik sosial, pemulung terlibat dalam relasi-relasi kekuasaan pada setiap interaksi sosialnya. Namun, interaksi yang dilakukan pemulung selalu terikat pada konteks (ruang-waktu), sehingga setiap relasinya dengan demikian juga selalu bersifat temporal dan spasial. Kompleksitas relasi pemulung di perkotaan dikelompokkan ke dalam 4 jenis: 1). Relasi dengan industri daur ulang; 2). Relasi dengan sesama pemulung; 3). Relasi dengan lingkungan; dan 4). Relasi dengan pemerintah. Karena kontekstual, masing-masing memiliki karakter interaksi dan relasi kekuasaan yang berbeda-beda. Masing-masing relasi akan dibahas satu persatu dan kemudian secara keseluruhan.

1). Relasi pemulung dengan industri daur ulang (pasar). Banyak aktor yang terlibat di dalam suatu industri. Namun satu-satunya aktor dalam industri daur ulang yang memiliki interaksi langsung dengan pemulung umumnya hanyalah bos lapak (bandar). Dalam rantai suplai industri daur ulang, pemulung berada pada posisi paling ujung dari bagian hulu. Ia memungut sampah yang bernilai jual dari jalan atau bak/gundukan sampah, lalu memilahnya secara terperinci agar bisa mendapatkan harga lebih tinggi, untuk kemudian menjualnya pada bos lapak. Jika ia memiliki *ikatan* dengan seorang bos lapak, ia hanya boleh menjual barang pada bos tersebut saja. Sementara jika ia mandiri (tidak terikat dengan bos), ia dapat menjual barang pada lapak atau pengepul manapun yang mampu membeli. Namun mayoritas pemulung hanya mampu menjual barang pada pengepul berskala menengah saja. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemulung untuk menyediakan suplai barang dalam jumlah besar pada pengepul besar ataupun pabrik. Salah satu norma dalam industri daur ulang adalah pabrik dan agen besar hanya menerima barang dalam kuantitas besar dan sudah dalam kualitas yang baik. *Rules* (aturan) tersebut berlaku umum, sehingga bukan hanya pemulung yang tidak dapat menjual ke pabrik, tetapi juga lapak skala kecil. Sebagai implikasi, pemulung tidak memiliki relasi sosial apapun dengan agen besar dan pabrik.

Rules lainnya dalam industri daur ulang adalah adanya prasyarat patron-klien dalam umumnya relasi antara *supplier* dan *buyer*; inilah yang disebut dengan ‘ikatan’. *Supplier* membutuhkan modal untuk dapat mengoperasionalkan bisnisnya, sementara *buyer* membutuhkan suplai barang yang konsisten dari *supplier*. Disepakati bahwa jika *buyer* memberikan pinjaman atau menanamkan modal pada *supplier*, maka *supplier* wajib menjual

hanya pada *buyer* tersebut saja. *Buyer* kemudian berlaku sebagai *patron* untuk *supplier*, dengan juga menyediakan beberapa bantuan jika *supplier* memiliki masalah. *Buyer* (*patron*) dalam *ikatan* biasa disebut dengan istilah ‘bos’, sementara *supplier* (*klien*) disebut dengan ‘anak buah’. Meskipun norma tersebut juga berlaku di area hulu (dalam hubungan antara bos lapak (*bos*) dan pemulung (*anak buah*)), tetapi ada beberapa perbedaan mendasar dengan relasi lainnya di dalam industri daur ulang. Bos lapak tidak hanya menawarkan pinjaman pada pemulung, tetapi juga fasilitas hidup dan jaminan keamanan (secara terbatas).

Pinjaman dari bos terbagi dua: pinjaman tetap dan pinjaman situasional. Pinjaman tetap dari bos lapak pada pemulung bersifat harian dan utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemulung, sehingga disebut dengan ‘uang makan’. Pinjaman situasional diberikan pada saat tertentu ketika dibutuhkan oleh anak buah; dan sifatnya tidak wajib. Hutang uang makan dibayar pemulung dengan cara dipotong dari hasil jual barang pada bos, yang biasanya dilakukan setiap 2 hingga 10 hari sekali (tergantung pada kuantitas hasil pulungan yang telah terkumpul). Pinjaman situasional, di lain pihak, dapat dibayar kapan saja selama masih dalam kesediaan bos. Sifat dua pinjaman tersebut berbeda. Pada uang makan, bos ingin anak buah selalu dalam kondisi meminjam padanya, karena hal ini adalah prasyarat dasar dari ‘ikatan’. Pada pinjaman situasional, bos umumnya ingin pengembalian yang segera. Sanksi dari pelanggaran terhadap norma seputar hutang berbeda bagi bos dan pemulung. Bos yang melanggar (tidak memberi uang makan) kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh pemulung. Sementara itu, pemulung yang melanggar (tidak membayar uang makan dan tidak memberi suplai barang), akan ditahan pemberian uang makan oleh bos; tapi untuk beberapa waktu tetap dapat menikmati *ikatan* fasilitas.

Fasilitas hidup yang disediakan oleh bos lapak adalah berupa hunian beserta kelengkapan dari hunian. Pemulung tinggal di dalam lapak bersama bos. Huniannya merupakan bangunan sementara (*bedeng*) yang dibangun di atas sebidang lahan. Kelengkapan hunian berupa halaman (dapat digunakan untuk pekerjaan memilah), kamar mandi bersama, listrik, air, dan tempat mencuci pakaian. Fasilitas ini tidak gratis; sama halnya dengan uang makan, pendapatan pemulung setiap penjualan barang akan dipotong sebagai uang sewa fasilitas. Kerusakan pada fasilitas juga ditanggung bersama oleh anak buah. Namun bagaimanapun, keamanan lapak tetap menjadi tanggung jawab penuh dari bos. Masalah keamanan umumnya muncul dari preman yang memaksakan iuran jasa keamanan dengan kedok rentenir. Preman tidak hanya menggunakan ancaman fisik sebagai sumber daya, tetapi juga simbol-simbol (seperti pakaian –misalnya- yang mengindikasikan ketentaraan, latar belakang ras, dll). Jika pemulung terlibat hutang di luar lapak dan kemudian kabur, rentenir akan terus menerus menuntut pada bos lapak atas pertanggung-jawaban. Demikian juga, jika anak buah mencuri di luar lapak dan kabur, korban pencurian terkadang meminta ganti rugi pada bos.

Pinjaman, fasilitas, dan keamanan lapak adalah sumber daya alokasi yang dimiliki oleh bos dalam relasinya dengan pemulung. Pemulung dependen terhadap bos karena mereka tidak memiliki atau kurang dalam sumber daya tersebut. Kemampuan ekonomi bos digunakan oleh anak buah untuk menutupi kekurangan sumber dayanya sendiri. Namun di sisi lain pemulung juga memiliki sumber daya sendiri dalam relasinya dengan bos, salah satu yang utama adalah suplai barang yang bersifat kontinu dan konstan. Dengan demikian, meskipun bandar lapak superior terhadap pemulung (karena ketimpangan sumber daya), tetapi dependensi bos cukup besar pada anak buahnya. Kemampuan ekonomi dan skala operasional lapak dapat menurun, bahkan bangkrut, jika bos tidak mampu memenuhi norma sosial yang ada di dalam relasi dengan anak buah. Biasanya hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi bos; jika sumber

daya bos berkurang, dapat terjadi konsekuensi seperti keluarnya anak buah dari lapak, atau bos itu sendiri membubarkan anak buahnya. Indikasi lainnya dari dependensi bos terhadap anak buah adalah engganannya bos mengusir anak buah dari lapak, meskipun ia tidak membayar uang makan. Kekurangan jumlah anak buah berarti juga kekurangan suplai barang yang akan dijual pada pabrik. Maka dalam kasus pelanggaran ini, bos lebih memilih untuk mengeksploitasi kepemilikannya atas sumber daya ekonomi (dan kurangnya pemulung dalam sumber daya ini) untuk mendesak anak buah melanggar norma.

Di lain pihak, dependensi anak buah terhadap satu bos justru tidak terlalu besar. Hal ini terlihat dari tingginya angka *turn over* (perpindahan) pemulung. Bukan hanya karena pemulung bebas berpindah lapak tanpa sangsi, tetapi pemulung juga cukup bebas dalam berganti profesi. Kebanyakan pemulung adalah '*unskilled labour*'⁶, sehingga rentan berpindah-pindah jenis profesi. Kebiasaan ini disebut oleh mereka dengan istilah *serabutan*. Tampaknya banyak profesi lain yang dapat dimasuki oleh pemulung. Lebih mudahnya anak buah memutuskan ikatan ketimbang bos, mengisyaratkan –pada derajat tertentu– lebih tingginya dependensi bos pada pemulung dibanding sebaliknya. Hanya saja, di antara pekerjaan 'lepas' lainnya, pemulung adalah salah satunya yang tidak membutuhkan modal ekonomi, yang juga disertai dengan penyediaan tunjangan hidup dasar dari bandar lapak. Dengan demikian, pemulung juga dependen pada keberadaan bandar lapak (meskipun tidak spesifik pada bos tertentu). Norma di antara lapak adalah bahwa anak buah cukup bebas berpindah antar bos; sehingga tidak ada sangsi bagi yang melakukannya, kecuali yang tidak membayar hutang ketika lepas ikatan.

Selain sumber daya ekonomi (pinjaman dan fasilitas), dalam relasi dengan anak buah, bos memiliki sumber dayalain, yaituberupa akses terhadap pemerintah dan pasar (lihat pada bagan 1). Pemulung memiliki kekurangan dalam sumber daya ini, sehingga dependen pada bos. Bukan hanya pemerintah dan pasar, pemulung juga tidak memiliki akses pada banyak aktor lain yang dianggap lebih superior (misalnya instansi lainnya). Bukan hanya bos yang memanfaatkan akses ini sebagai sumber daya dalam menghadapi anak buah, tetapi anak buah juga memanfaatkannya sebagai jembatan yang menghubungkannya pada aktor lain. Semua tindakan yang dilancarkan dalam relasi bos dan anak buah ini, yang sebagian besarnya adalah tindakan strategis, adalah hasil dari pemantauan refleksif dari masing-masing aktor terhadap dirinya dan orang lain. Sebagaimana bos bersiasat dengan meninjau kekurangan sumber daya anak buah, demikian pula anak buah mengambil keuntungan dari sumber daya bos.

2). Relasi antara sesama pemulung. Secara umum, ada dua tipe relasi yang dibangun pemulung dalam berinteraksi dengan sesamanya. Pertama relasi antar pemulung di dalam lapak, dan kedua relasi pemulung dengan pemulung lain di jalan. Interaksi di dalam lapak terjadi cukup intens, karena ukuran hunian yang relatif kecil dan jarak masing-masing kamar yang sempit. Jika jumlah hunian tinggi, maka kepadatan juga tinggi. Implikasinya adalah privasi yang hampir tidak ada. Situasi semacam ini pada satu sisi menyebabkan intimasi dalam relasi antar penghuni. Tolong menolong dan berkumpul adalah hal yang lumrah terjadi. Kegiatan rutinpun sering dilakukan bersama. Akan tetapi di sisi lain, interaksi di dalamnya sangat rawan konflik. Tingginya intensitas pertemuan, kurangnya ruang privat, dan kelangkaan sumber daya, menyebabkan banyak kepentingan di dalam yang bertabrakan. Setiap interaksi bersifat temporal; ketika kepadatan hunian jauh berkurang (dapat diamati apabila lapak mengalami penurunan jumlah anak buah secara drastis), konflik pun juga

⁶Istilah *unskilled labour* digunakan bukan untuk mengatakan bahwa pemulung tidak memiliki keahlian, tetapi digunakan untuk merujuk pada tenaga kerja yang tidak dilatih secara formal dan profesional.

berkurang. Tidak hanya temporal, interaksi juga bersifat spasial; jarak fisik menentukan hasil (*outcome*) dari produksi dan reproduksi struktur.

Konflik kepentingan di dalam relasi antar pemulung di dalam lapak juga terjadi di dalam relasi pemulung dengan pemulung lain di luar lapak. Sama seperti di dalam lapak, konflik di jalanan muncul karena pertentangan kepentingan, yang utamanya berpusat pada isu perebutan sumber daya. Namun karena konteks spasial yang berbeda, properti struktural (*rules* dan sumber daya) kedua relasi pun berbeda. Di dalam lapak –misalnya-, perselisihan pemulung umumnya terjadi karena pertengkaran anak-anak mereka, perebutan fasilitas dan persaingan dalam mendapat simpati (dari bos maupun orang luar). Di jalanan, konflik baru muncul ketika terjadi pencurian barang oleh pemulung lain dan adanya persoalan perebutan wilayah pekerjaan. Norma di sebagian jalanan adalah bahwa pemulung harus menghormati lahan kerja masing-masing, dengan tidak melampauinya. Norma lainnya pemulung harus berhati-hati menjaga barang pulungan karena adanya potensi pencurian dari orang lain. Interaksi antar pemulung di jalan diwarnai dengan kecurigaan dan kewaspadaan. Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, ada kesetaraan dan familiaritas di dalam relasi antar pemulung tersebut; salah satu dari sedikit jenis interaksi yang seimbang yang dialami pemulung ketika berada di luar lapaknya. Hal ini disebabkan mereka saling menggunakan sumber daya yang cukup setara di dalam interaksi. Dengan demikian, meskipun sebagian pemulung saling bersaing, sebagian lainnya memilih untuk bertukar informasi dan bercengkerama di jalan jika bertemu.

3). Relasi dengan lingkungan. Pemulung yang tinggal di Jalan TPA hanya bergaul dengan penghuni jalan itu saja, mereka tidak bergaul dengan warga sekitar lainnya. Interaksi antara pemulung yang berbeda lapak tidak tinggi seperti halnya interaksi di dalam lapak, tetapi pemulung seringkali saling kenal. Karena usia menetapnya yang cenderung lebih lama, bos lapak saling mengenal, dan cenderung memiliki relasi yang baik meskipun perpindahan pemulung antar lapak cukup tinggi. Konflik antar lapak muncul biasanya jika ada pemulung yang pindah ke lapak tetangga dengan tidak membayar hutangnya pada bos terdahulu. Namun konflik biasanya terjadi hanya antara bos terutang dengan pemulung, bukan antar sesama bos. Setiap bos lapak memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga karakter lapak-lapak tidak persis sama. Lapak dengan kuantitas dan kualitas sumber daya yang lebih baik umumnya lebih menarik bagi pemulung.

Meskipun interaksi di dalam lapak tinggi –dan pada level tertentu juga terjadi di jalan TPA-, tetapi dengan warga sekitar lainnya hampir tidak ada. Potensi interaksi pemulung dengan orang luar dapat dikatakan hanya dengan orang-orang yang ada di tempat ia memulung. Interaksi yang berulang menciptakan relasi dengan warga dan praktik sosial di tempat memulung. Salah satu norma di jalanan –misalnya-, sampah yang diambil hanya yang berada di luar pagar rumah dan di tempat-tempat terbuka. Jika tertarik dengan sampah yang berada di dalam pekarangan berpagar, pemulung harus meminta izin dahulu pada tuan rumah untuk mengambilnya, meskipun jika pintu pagar terbuka. Sebagian pemulung berlaku juga sebagai tukang sampah; menerima upah dari beberapa rumah dengan mengambil seluruh sampah mereka (yang bernilai jual maupun yang tidak).

Sumber daya yang digunakan pemulung dalam relasinya dengan warga berbeda-beda tergantung pada konteks. Dalam interaksi dengan warga tempat ia memulung, ia menggunakan sumber daya berupa jender, usia, sikap kepribadian, dan lainnya untuk bisa mendapatkan hasil memulung yang maksimal. Sebagai contoh, pemulung perempuan yang sudah tua bisa mendapatkan barang dengan kualitas (nilai jual) yang lebih tinggi dari pada pemulung laki-laki yang masih muda. Dalam interaksi dengan warga sekitar lapak (dimana

pemulung tidak memiliki kepentingan ekonomis), pemulung memilih untuk tidak berinteraksi secara langsung. Jika diadakan acara kumpul massa (seperti acara hajatan), pemulung tidak pernah hadir; hanya bos yang sesekali datang pada acara tersebut. Salah satu hal yang menonjol dalam hubungan antara pemulung dengan orang lain di luar lapak (dalam wilayah kota), pemulung mengalami gangguan kepercayaan diri. Pemulung mengkarakan profesinya sebagai pekerjaan yang hina; begitu juga dengan dirinya. Struktur dominasi terbentuk karena adanya ketimpangan dalam sumber daya.

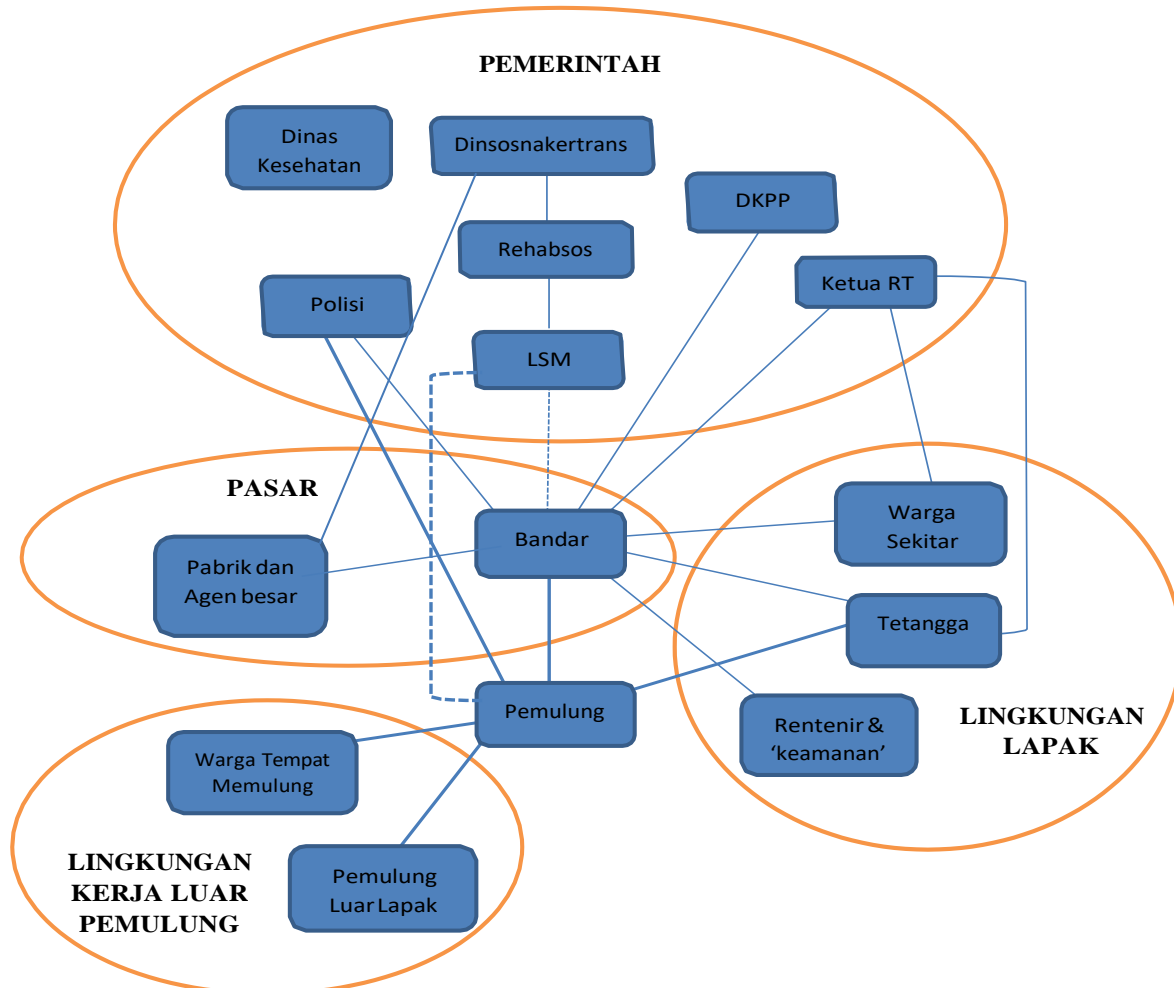
4). Relasi pemulung dengan pemerintah. Sama halnya dengan relasi mereka dengan warga sekitar, pemulung hampir tidak memiliki interaksi dengan aktor pemerintah. Beberapa dari aktor tersebut memiliki kepentingan dengan pemulung, antara lain: DKPP (Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman) yang mengelola TPA Cipeucang, Ketua RT wilayah tersebut, Rehabsos (Rehabilitasi Sosial), Dinsosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi), dan polisi. Kebanyakan dari mereka hanya berinteraksi dengan bos lapak (dan LSM), bukan pemulung secara langsung. DKPP memiliki kepentingan untuk menertibkan dan dalam organisasional lokasi TPA; Ketua RT perlu mengetahui situasi dan kondisi wilayah tanggung jawabnya; Rehabsos harus menjalankan program pemberdayaan pemulung yang ditugaskan padanya dari Dinas Sosial; Dinsosnakertrans memiliki unit khusus untuk menangani ekonomi informal; dan polisi bertugas dalam kasus kriminal yang sering melibatkan pemulung dan bos lapak (perjudian, pencurian, dan penadahan barang curian).

Di antara kelima aktor, hanya polisi yang berinteraksi secara langsung dengan pemulung; hal ini pun hanya terjadi jika pemulung terlibat kasus kriminal. Jika anak buah terlibat pencurian, seringkali bos juga ditangkap karena dituduh sebagai penadah barang curian. Rehabsos yang bertugas sebagai representasi pemerintah yang bertanggung jawab atas masyarakat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), tidak berinteraksi secara langsung dengan lapak, melainkan hanya melalui LSM yang menjembatani. Sementara itu, program Dinsosnakertrans atas ekonomi informal belum diformulasi dengan baik, sehingga tidak menangani pemulung sama sekali. DKPP dan ketua RT merasa interaksi dengan bos sudah cukup mewakili relasi dengan anak buah lapak. Bos, dalam relasinya dengan anak buah, disadari atau tidak, memiliki sumber daya berupa akses pada aktor pemerintah. Namun hal ini juga menguntungkan bagi anak buah; pemulung juga menggunakan bos sebagai mediana untuk mengatasi masalah interaksinya dengan berbagai aktor.

Pemerintah merupakan aktor yang memiliki kekuasaan (signifikasi, dominasi, dan legitimasi) sangat besar, baik dalam jangkauan maupun intensitas kontrolnya. Dengan demikian pemerintah memiliki kemampuan untuk menginklusi dan mengeksklusi. Salah satu *rules* negara demokrasi modern adalah kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam interaksi antara negara dengan pemulung (atau dari tidak adanya interaksi tersebut), menunjukkan dua alternatif indikasi, yaitu: pertama, negara melanggar norma yang mengatur kesejahteraan, atau; kedua, eksklusi sosial dan deprivasi adalah norma dari negara. Bisa jadi kedua indikasi tersebut hadir secara bersamaan. Kesejahteraan sosial memang secara konstitusional adalah *rules* dari negara modern. Namun, eksklusi sosial dan deprivasi yang disebabkan oleh ketertutupan akses atas sumberdaya ('pelangkaan' sumber daya) juga merupakan praktik sosial yang terjadi. Dalam menghadapi negara yang demikian, bagaimanapun, pemulung bukan berarti tidak memiliki strategi. Pemulung memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki (bos, jaringan di kota, dan jaringan di kampung) untuk mengatasi persoalan keterbatasan akses; meskipun sumber daya tersebut juga memiliki limitasi tertentu.

Bagan berikut ini menggambarkan relasi-relasi yang terjadi di dalam sektor ekonomi informal industri daur ulang, dengan difokuskan pada bagian hulu dari industri. Bagan

memperlihatkan bahwa hubungan pemulung dengan lingkungan non-pemulung umumnya dijembatani oleh bos lapaknya; terutama dalam interaksi dengan pihak pemerintah dan pasar. Dalam relasinya dengan banyak pihak, pemulung menjadikan relasi dengan bos sebagai sumber dayanya.



Ket:

Garis titik-titik menggambarkan interaksi yang menurut pihak Rehabsos terjadi, tetapi tidak dibenarkan oleh bandar dan pemulung.

Garis tebal adalah relasi yang dibangun pemulung, garis tipis adalah relasi yang dibangun bos lapak.

Bagan 1. Relasi Antar Aktor dalam Sektor Ekonomi Informal

Refleksi Teoretik

Relasi kekuasaan yang dijalin pemulung dengan aktor-aktor di luar dirinya, selalu dalam kerangka dialektika kontrol. Meskipun secara sekilas tampak sepertinya superordinat memegang peranan dalam pelaksanaan dan mekanisme jangkauan dan intensitas kontrol,

tetapi setiap adanya keterlibatan kekuasaan dalam interaksi, relasi yang terjadi selalu adalah dua arah. Upaya dominasi yang dilakukan oleh aktor superordinate dalam sektor ekonomi informal, bukanlah berhadapan dengan individu subordinat yang non-reflektif. Justru sebaliknya, seluas dan sedalam apapun kekuasaan (dan secanggih apapun mekanisme kontrol) yang dimiliki oleh pihak superior, subordinat (selemah dan sebagaimanapun terpresinya) selalu dapat menyusun strateginya sendiri (Giddens, 1985: 11).

Pemulung selalu memiliki derajat otonomi tertentu dalam setiap relasi yang ia bangun, meskipun relasi tersebut sangat timpang. Dalam relasi dengan bos lapak, pemulung anak buah memiliki otonomi yang cukup tinggi, baik dalam pengaturan teknis kerja maupun dalam mengambil keputusan terkait *ikatan* dan kehidupan secara umum. Bos, di lain pihak, sangat dependen pada anak buahnya. Tanpa pemulung anak buah, bos tidak bisa mendapatkan suplai barang murah secara kontinu. Bahkan aktor industri daur ulang yang lebih besar pun (pabrik kecil, menengah, maupun besar) dependen terhadap pemulung. Ketersediaan suplai barang utamanya ditentukan oleh pergerakan pemulung; demikian juga dengan stabilitas harga barang secara global.

Bukan hanya para aktor di dalam industri daur ulang yang dependen pada pemulung, tetapi demikian juga dengan negara. Di Indonesia (dan banyak negara berkembang lainnya), manajemen sampah masih buruk. Keberadaan pemulung sangat menolong dalam menyelesaikan sebagian dari persoalan penanganan sampah. Negara pun diuntungkan dengan adanya industri barang daur ulang, sebab sejalan dengan konsep keberlanjutan lingkungan, dan berkurangnya jumlah sampah yang harus dikelola di pembuangan-pembuangan akhir. Relasi antara otonomi dan dependensi menjadi penggerak di dalam dialektika kontrol, yang menghasilkan produksi dan reproduksi dari struktur dominasi. Dialektika kontrol dimungkinkan karena masing-masing aktor memiliki sumber daya, serta *rules* dan *knowledgeability* (kepengetahuan) yang mengelola sumber daya tersebut. Sebagaimana aktor superior (negara, pasar, dll) memiliki sumber daya, pemulung pun demikian; meskipun sebagian besar sumber daya yang dimiliki pemulung adalah 'sisa-sisa' (kurang bernilai atau kurang diinginkan oleh aktor lain).

Aktor –termasuk pemulung-, memiliki beragam sumber daya (alokasi maupun otorisasi). Masing-masing sumber daya tersebut tidak seluruhnya digunakan di dalam sebuah interaksi secara bersamaan. Hal tersebut tergantung pada konteks dari ruang-waktu. Penilaian atau evaluasi atas sumber daya dilakukan pemulung dalam pemantauan refleksifnya; ketika meninjau dirinya, diri orang yang berinteraksi dengannya, dan lingkungannya. Sumber daya yang digunakan oleh pemulung dalam interaksinya dengan bos berbeda dengan sumber daya yang digunakannya ketika berhadapan dengan warga. Dalam relasi dengan bos, pemulung umumnya menggunakan sumber daya suplai barang (tenaga kerja), sementara dengan warga tempat memulung, pemulung menggunakan sumber daya yang lebih variatif (penampilan, sikap, usia, jender, dll). Bos (atau relasi dengan bos), juga menjadi sumber daya bagi aktor pemulung, agar bisa mengakses hal-hal yang dieksklusikan darinya. Eksklusi tidak hanya terjadi melalui pembatasan yang 'tegas' (syarat rekrutmen pegawai, prasyarat pengiriman barang pada pabrik, dll), namun juga melalui simbol yang lebih 'halus' (seperti kertas formulir pengisian kredit, gedung instansi kelembagaan, dll). Simbol-simbol tersebut dimaknai sebagai representasi kekuasaan oleh pemulung, sehingga mereka membangun sejenis 'relasi kekuasaan' dengannya.

Sebab berkaitan dengan skema interpretasi, signifikasi terhadap benda, orang, maupun sesuatu lainnya bukan hanya menjadikan hal-hal tersebut sebagai simbol tetapi juga bisa menjadikannya sebagai sumber daya. Dengan kata lain, sumber daya ditentukan oleh *rules*

dari sebuah interaksi. Sesuatu baru dapat menjadi sumber daya ketika kode dan norma di dalam praktik sosial menjadikannya sebagai suatu modalitas. Kepemilihan ekonomi menjadi sumber daya bagi bos lapak dalam relasi dengan pemulung, sementara ketika berhadapan dengan bos pabrik, ia tidak lagi dapat bergantung hanya pada sumber daya ekonomi, melainkan lebih kepada suplai barang. Karena proses signifikasi sumber daya membutuhkan keahlian, banyak hal yang tidak disadari aktor bisa menjadi suatu sumber daya. Oleh sebab itu skema interpretatif sangat penting dalam relasi dominasi. Kapabilitas *knowledgeability* dan pemantauan refleksif aktor berpengaruh terhadap reproduksi relasi kekuasaan; bukan hanya pada kemampuannya untuk mengetahui konteks yang tepat dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga pada interpretasinya yang tepat mengenai hal yang dapat dijadikan sumber daya. Perbedaannya tampak pada masing-masing aktor; bos – misalnya- lebih mampu memetakan sumber dayanya ketimbang pemulung.

Bergantungnya pemaknaan atas sumber daya pada *rules* dan konteks, menjadikan sumber daya mampu untuk diubah (*convertable*). Dalam interaksi dengan pemulung anak buah, bos dapat mengubah sumber daya ekonominya menjadi sumber daya berupa akses pada pasar; sebagaimana pabrik dapat mengubah sumber daya properti (mesin, teknologi, dll), pekerja, dan jaringan menjadi uang. *Convertability* dari sumber daya dimanfaatkan oleh aktor sosial untuk memaksimalkan kekuasaannya dalam struktur dominasi. Relasi itu sendiri dapat menjadi suatu sumber daya. Hal ini dimungkinkan karena setiap relasi tidak hanya tunggal berdiri sendiri; melainkan saling terkait satu sama lain. Setiap interaksi yang dilakukan pemulung meninggalkan jejak kenangan (*memory traces*) yang ia pergunakan sebagai salah satu landasan utama dalam setiap pemantauan refleksifnya atas dirinya dan diri orang lain dalam tindakan dan interaksi yang berikutnya; atau yang lebih sering disebut Giddens sebagai *knowledgeability*. Relasi pemulung dengan bos, berkorelasi dengan relasi pemulung dengan pabrik (dan pasar yang lebih luas). Relasi dengan bos menjadi sumber daya bagi pemulung dalam menghadapi pasar. Sementara itu, interaksi antara bos lapak dengan pemulung juga memiliki pengaruh pada interaksi antara bos lapak dengan pabrik. Tanpa anak buah, bos tidak memiliki sumber daya berupa suplai barang pada pabrik. Dengan agensi aktor dan fleksibilitas dari sumber daya, relasi kekuasaan selalu adalah relasi antara otonomi dan dependensi, yang sifatnya temporal dan spasial. Oleh sebab itu, dalam reproduksi sistem sosial, event yang tercipta tidak selalu *intended*, tapi juga muncul *unintended consequences*. Hasil ini lah yang menyebabkan praktik sosial tidak harus selalu sama pada setiap kejadiannya, dan karakter relasi kekuasaan antar individu juga demikian.

Penutup

Melalui sudut pandang Giddens (1979, 1984, 1985, dan 1993), praktik sosial (termasuk di dalamnya relasi kekuasaan) yang dialami dan direproduksi oleh pemulung tidak pernah lepas dari hubungan dualistis antara agen dengan struktur, di dalam maupun di luar lapak. Sebagai agen manusia yang memiliki agensi, pemulung secara harfiah dianugrahi kekuasaan; yaitu kemampuan untuk bertindak berbeda dari ekspektasi dan aturan main struktural yang ada (aspek *kemampuan transformatif*). Akan tetapi, di sisi lain, dalam menentukan dan melakukan tindakan, pemulung juga dibatasi oleh struktur. Aspek kekuasaan ini yang disebut sebagai *struktur dominasi*. Relasi kekuasaan yang meliputi pemulung berarti adalah relasi antara otonomi dan dependensi dari aktor-aktor yang terkait di dalam praktik sosial. Bukan hanya secara eksklusif sebuah fenomena dominasi maupun fenomena kekuatan agensi, melainkan suatu dialektika kontrol antara agen yang terlibat. Praktik sosial tidak pernah lepas dari konteksnya yaitu ruang dan waktu. Dengan demikian, relasi kekuasaan yang dibangun

oleh pemulung tidak selalu memiliki karakter yang sama; semua interaksi yang terjadi di dalam sektor ekonomi informal selalu bersifat temporal dan spasial.

Meskipun baik pemulung maupun aktor lainnya sama-sama memiliki otonomi dan dependensi, tetapi sumber daya yang terlibat tidak terdistribusi dengan merata. Ketimpangan sumber daya ini, yang direproduksi terus-menerus, menyebabkan bertahannya struktur dominasi di dalam sektor ekonomi informal. Implikasinya yang utama adalah eksklusivitas sosial dan deprivasi sosial yang dialami oleh para aktor yang minim sumber daya, seperti pemulung dan bandar lapak. Keduanya hidup dalam kerentanan sosial ekonomi yang tinggi karena tidak memiliki akses pada sebagian besar sumber daya. Ketertutupan tersebut terjadi karena pemaknaan atas sumber daya ditentukan melalui signifikansi dan legitimasi. Material dan non-material yang dimiliki pemulung dan bandar memiliki nilai sumber daya yang rendah. Agar pemulung dan bandar dapat keluar dari kerentanan sosial, eksklusivitas sumber daya harus dibuka dan *rules* terkait mereka harus diubah (terutama dilakukan oleh pemerintah, sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk itu). Berbagai cara dapat dilakukan, seperti reformasi pada institusi pendidikan, reorganisasi pengelolaan sampah yang melibatkan pemulung, pengakuan terhadap peran pemulung dalam perkembangan ekonomi nasional, perbaikan ketimpangan antara desa-kota, program pemberdayaan yang memahami sudut pandang pemulung dan bandar, pasar (industri) yang lebih humanis, dan perbaikan tempat tinggal.

Daftar Pustaka

- Babbie, Earl. (1990). *Survey Research Methods*. Belmont, CA: Wadsworth
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications Inc.
- Denzin, Norman. K. *Qualitative Methodology*. Dalam Clifton D. Bryant dan Dennis L. Peck (Ed.). (2007). *21st Century Sociology: A Reference Handbook*. California: Sage Publication, Inc.
- Dias, Sonia, dan Melanie Samson. (2016). *Informal Economy Monitoring Study Sector Report: Waste Pickers*. Cambridge, MA, USA: WIEGO.
- Giddens, Anthony. (1979). *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Houndmills: The Macmillan Press LTD
- Giddens, Anthony. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press
- Giddens, Anthony. (1985). *The Nation-State and Violence: Volume Two of A Contemporary Critique of Historical Materialism*. Cambridge: Polity Press
- Giddens, Anthony. (1993). *New Rules of Sociological Method (2nd Edition)*. California: Stanford University Press.
- ILO/WIEGO. (2013). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (2nd Ed.)*. Geneva: International Labour Office .

- Khasnabis, Ratan dan Pranab Nag. (2002). *Labour Process in the Informal Sector: A Handloom Industry in Nadia District*, dalam *Economic and Political Weekly*, Vol. 36, No. 52 (Desember 29, 2001 - Januari 4, 2002).
- Neuman. Allan. (2004). *Social Research Methods, Qualitative dan Quantitative Approach*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Portes, Alejandro dan William Haller. (2005). *The Informal Economy*. Dalam Neil J. Smelser & Richard Swedberg (Ed.). *The Handbook of Economic Sociology*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sriranjini, Vadiraj *et. al.* (2010). *Sample Study of Informal Waste Pickers in Bangalore: September -October 2010*. CHF Internasional India & Mythri Sarva Seva Samithi: Laporan Penelitian.
- Tevera, D. S. (1994). *Dump Scavenging in Gaborone, Botswana: Anachronism or Refuge Occupation of the Poor?*, dalam *Geografiska Annaler. Series B, Human Geography*, Vol. 76, No. 1 (1994).
- Utama, Rahardhika Arista. (2013). "Mlipir: *The Genesis within Relations of Production between Industrial Sector and Rural Society.*" *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 19-46.
- Vivek, P. S. (2000). *Scavengers: Mumbai's Neglected Workers*, dalam *Economic and Political Weekly*, Vol. 35, No. 42 (Oktobrt 14-20, 2000).
- Wirutomo, Paulus. (2016). *Dealing with Brawls in Jakarta's Slum Area: Pursuing Social Development through Social Engagement*. The Senshu Social Well-being Review No.3, 2016, pp. 93-109.